



Segel Rumah Dinas Bappeda

■ Pemprov Gencar Tertibkan Aset

PONTIANAK, TRIBUN - Pemerintah provinsi Kalimantan Barat menyegel rumah dinas mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalbar tahun 2007 di Jl Pang Semangai, Rabu (2/10). Penyegelan itu dilakukan oleh tim Bappeda dan Satpol PP Povinsi Kalbar. Tim yang bergerak melakukan penyegelan adalah dari Biro Aset Pemerintahan Provinsi Kalbar, Polda Kalbar, Satpol PP Provinsi Kalbar.

Kepala Biro Pengelolaan Aset Kalbar, Linda Purnama Linda Purnama, Karo Pengelolaan Aset Setda Pemprov Kalbar mengatakan, sejak selesai masa jabatan tahun 2009 mantan Kepala Bappeda belum juga mengembalikan aset. Sebelumnya, pemprov telah mengirimkan surat dan berkomunikasi langsung dengan mantan Kepala Bappeda bersangkutan.

"Beliau dengan jelas menunjukan SK sebagai rumah dinas jabatan Bappeda tahun 2007. Sangat tegas disana dinyatakan ketika yang bersangkutan sudah tidak menjabat, maka dia harus menyerahkan kunci kepada gubernur melalui Biro Perengkapan, paling lambat 90 hari setelah selesai masa jabatan. Kami sudah menyurati berkali-kali tetapi belum direspon sehingga kita me-



Semuanya mau kita ambil alih tidak ada operasional untuk rumah dinas dan yang berhak mempunyai rumah dinas adalah gubernur, wakil gubernur, dan sekda yang lain tidak

H Sutarmidji
Gubernur Kalimantan Barat

lakukan ini (penyegelan)," kata Linda.

Linda mengatakan, Kepala Bappeda yang menjabat saat ini tinggal di rumah pribadinya. "Karena ini adalah rumah dinas jabatan kepala Bappeda, apakah nanti akan digunakan sebagai rumah dinas jabatan, itu tergantung dari Pak Gubernur sebagai penguasa barang milik daerah," paparnya.

Linda menerangkan, pada tahun 2019, Biro Pengelolaan Aset Provinsi Kalimantan Barat telah menyelamatkan tujuh rumah dari belasan rumah dinas. Baik dari hasil temuan BPK maupun hasil target dari program kerja Pengelolaan Aset Kalbar.

"Rumah yang akan disegel ada belasan namun yang menjadi target yaitu rumah jabatan. Saat ini sudah ada tujuh yang sudah inkrah dan sisanya akan diselesai-

kan di tahun 2020," tuturnya.

Dikatakan Linda, kali ini penertiban aset bangunan milik Bappeda Provinsi Kalbar dan rencana dua pekan ke depan akan menyasar rumah jabatan Nakertrans di Jalan Sudarso. Terkait penyegelan rumah milik Bappeda, ternyata masih di tempat namun mantan pejabat ini masih menyimpan kunci rumah tersebut tapi tidak berada di Kalbar.

"Beliau sedang di Jakarta tapi tadi ada yang menjaga rumah tersebut. Kami sudah minta paling lambat tanggal 1 menyerahkan kunci tapi beliau masih ingin mempertahankan. Alasannya karena tidak ada keadilan, karena ada beberapa mantan kadis yang juga masih

■ Bersambung ke hal. 11



Dasar Penyegelelan

- Surat Perintah Gubernur Kalbar No.800/3147/PA-C tanggal 1 Oktober 2019 - Penertiban aset milik Pemprov Kalbar yang tercatat di Bappeda Kalbar
- Penegakan Perda dan Perkada

Sasaran

- Satu unit rumah dinas Kepala Bappeda Kalbar di Jalan Pang Semangai No-38 Pontianak yang masih didiami Mantan Kepala Bappeda Kalbar, Fathan A Rasyid



TRIBUN PONTIANAK/
ANGGITA PUTRI
ASET - Tim Biro Aset Pemerintahan Provinsi Kalbar melaksanakan penyegelan dalam kegiatan penertiban aset bangunan milik Bappeda Kalbar, di Jalan Pang Semangai No 38 Pontianak, Rabu (2/10).

Aksi Penyegelelan

1. Rabu (2/10) pukul 08.00 WIB, sesuai apel gabungan di halaman Kantor Satpol PP Provinsi Kalbar, tim Mulai bergerak menuju rumah mantan Kepala Bappeda
2. Saat penertiban aman terkendali, penghuni rumah tidak ada di tempat. Pada saat tim membuka pintu rumah tersebut, terdapat eberapa perabotan rumah yang masih layak pakai sehingga ditata di salah satu kamar kemudian didata dan dicatat kedalam aset daerah. Keterangan RT setempat, rumah tersebut dihuni petugas kebersihan yang ditugaskan Bapak Fathan untuk menjaga dan memelihara. Rumah tersebut sesekali didatangi Bapak Fathan datang untuk melihat keadaan
3. Setelah dilakukan penandatanganan berita acara serah kepada Biro Aset Provinsi Kalbar dan mengganti kunci pintu rumah tersebut dengan yang baru. Penyegelelan disaksikan Ketua RT/RW setempat. Dilanjutkan dengan Apel Rekonsiliasi



Sumber: Kepala Biro Pengelolaan Aset Kalbar

GRAFIK: ENRO

Petugas

- Dipimpin Kasatpol PP Provinsi Kalbar
- Anggota Satpol PP Provinsi Kalbar berjumlah 27 orang
- Kepala Inspektorat Provinsi Kalbar
- Kepala Biro Aset Provinsi Kalbar dan Staf
- Pjw Ka Bappeda Provinsi Kalbar
- Staf, Ka Biro Hukum (diwakili 2 Kabid)
- Kasi Korwas PPNS Polda Kalbar
- Anggota dari Polresta Kota Pontianak berjumlah 7 orang





Segel Rumah Dinas Bappeda

Sambungan Hal.9

menempati rumah dinas. Ke depan itu akan diperlakukan sama," terangnya.

Pada tahun 2019, Linda mengakui terdapat tujuh rumah yang diproses dan ketika aset tersebut sudah kembali ke pemprov akan disesuaikan dengan tata kelola dan akan dikembalikan kepada pengguna barang atau pejabat yang saat ini menjabat, apakah mau ditempati lagi sebagai rumah jabatan. "Tapi itu juga tergantung Gubernur apakah mau digunakan lagi atau bagaimana," ujarnya.

Linda menjelaskan, untuk status kedua rumah ini kurang lebih sama meski untuk rumah yang hari ini disegel merupakan rumah yang tidak diperkarakan di pengadilan tapi hasil temuan BPK, dan yang harus segera di tindak lanjuti.

Sebelum menyegel, dia kuinya untuk rumah yang berada di Jalan Soedarso termasuk dari dinas terkait sudah memberikan surat peringatan untuk mengembalikannya kunci rumah.

"Kami sudah menyurati dan protapnya sudah sekian kali kami lakukan, dan beliau minta waktu enam bulan untuk memin-

ahkan barang ke rumah pribadi sambil merehab rumah pribadinya. Tapi ketika jangka waktu yang disepakati berlaku, beliau malah memPTUN-kami. Kemudian diproses di pengadilan dan sekarang sudah inkrah dan sudah di menangkan oleh pihak pemprov tinggal eksekusi saja," paparnya.

Hingga saat ini, dijelaskannya meski telah disurati dan diinformasikan hasil pengadilan telah inkrah, mantan Kadis Nakertrans yang menjabat sekitar sepuluh tahun lalu itu masih menempati rumah tersebut.

"Putusan ini juga sudah di informasikan kepada pihak yang menempati rumah dinas dan beliau sudah tau karena putusannya juga sudah keluar," jelasnya.

Sebelumnya, Linda menambahkan pihaknya juga telah melakukan penyegelan rumah dinas di Kota Singkawang pada Agustus lalu yaitu juga rumah jabatan Nakertrans.

"Itu juga diperkarakan di pengadilan dan inkrah juga termasuk yang ada di Karvin dengan total ada empat rumah," tegasnya.

Ia mengatakan sejauh ini keadaan rumah pejabat un-

tuk dewan yang di Karvin ini sudah tidak layak lagi untuk ditempati tapi dikerjasamakan pihak ketiga dari segi pemanfaatan aset supaya lebih punya nilai untuk pendapatan asli daerah.

Linda menambahkan dalam keputusan Gubernur dalam penunjukan pemanfaatan rumah itu sebagai rumah jabatan kepala Bappeda terdapat 1 SK yang menunjukkan bahwa ketika tidak lagi menjabat sebagai Kepala Bappeda, paling lambat 90 hari sudah mengosongkan rumah dan menyerahkan kunci rumah kepada Pemprov Kalbar.

"Kita siap kapan beliau siap, dan Bappeda akan menyurati beliau untuk berkoordinasi untuk pemindahan barang," ujarnya.

Ganti Operasional

Sementara itu, Gubernur Kalbar, Midji mengatakan rumah yang disegel tersebut jelas rumah dinas milik pemerintah provinsi Kalbar, tapi sudah ada yang dikuasai oleh pihak ketiga melalui orang yang menempati rumah tersebut.

"Kita mau tertibkan sesuai dengan saran KPK agar bermanfaat untuk pembangunan bukan dimanfaatkan oleh perseorangan. Inilah yang menjadi kelemahan kita,"

ujarnya.

Ke depan, Gubernur Kalbar akan mempertimbangkan untuk tidak ada lagi rumah dinas bagi kepala dinas. "Semuanya mau kita ambil alih tidak ada operasional untuk rumah dinas dan yang berhak mempunyai rumah dinas adalah gubernur, wakil gubernur, dan Sekda yang lain tidak," ujarnya.

Sama halnya dengan mobil dinas. Ia katakan kedepan tidak ada lagi mobil dinas dan ia akan memberikan tambahan biaya transportasi antara Rp 6 juta sampai Rp 7 juta perbulan agar lebih efektif dan efisien.

"Supaya tidak repot lagi bawa sana sini, nanti ribut lagi. Sekarang sudah ada yang disegel nanti bisa nambah biaya lagi untuk mengurusnya," ujarnya. Ia menambahkan semua pihak semestinya sudah tahu kalau rumah dinas saat ini tidak bisa di Dum.

"Saya tidak tau jumlah asetnya berapa tapi cukup banyak. Kalau tidak dimanfaatkan apa lagi di tempat strategis bisa dilelang saja atau HGB di atas HPL supaya ada pertumbuhan di kawasan itu," ujarnya. (ang)